

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan

Penulis:

Nadya Nurul Sabrina¹⁾
Isfenti Sadalia²⁾

Afiliasi:

Universitas Sumatera Utara^{1,2)}

Korespondensi:

Nadyanurul07@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 16-06-2021
Accepted: 18-06-2021
Published: 01-07-2021

Abstrak: Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kunci sukses bagi perusahaan dalam memperoleh keuntungan untuk mencapai tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek dan agar dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global, dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan menerapkan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Namun pemahaman menyeluruh tentang *state-of-art* dari *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasi publikasi ilmiah dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG yang terdiri dari *transparency, accountability, responsibilities, independency dan fairness*. Hasil penelitian ini diuji menggunakan triangulasi sumber, kemudian dipaparkan setiap prinsip-prinsip yang sudah dilaksanakan oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada subjek penelitian baik.

Kata kunci: Good Corporate Governance

Pendahuluan

Konsep *Good Corporate Governance* muncul berdasarkan *Agency theory* yang ini memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal dimana pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik (prinsipal). Pihak manajemen harus mengungkapkan informasi perusahaan kepada pihak pemilik (prinsipal) namun terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari perusahaan sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sehingga dengan adanya *good corporate governance* permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer akan teratasi. (Hart dalam Sayidah, 2007).

Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance* Menurut Sutojo dan Aldridge (2005: 5), *good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Sedangkan menurut Daniri (2006: 15-16), manfaat penerapan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:



1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada subjek penelitian terdiri dari prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Studi Literatur

Penerapan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil survei IICG berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) untuk mengukur *corporate governance*. Alasan penggunaan indeks ini disebabkan oleh keterbatasan data tentang penelitian penerapan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Indeks tersebut merupakan satu-satunya indeks yang dipublikasikan dari hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* juga diperkuat di dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/ 2011:

1. **Transparency** yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Accountability** yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. **Responsibility** yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. **Independency** yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Fairness** yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Melalui fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan judul “penerapan prinsip-prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari *transparency, accountability, responsibilites, independency dan fairness*) pada suatu perusahaan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Hasil

Corprate Governance menurut Tunggal (2012:24) merupakan sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, dan masyarakat sekitar.

Good corporate governance merupakan suatu konsep yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan dari firm performance. Penerapan perilaku-perilaku etis untuk dapat melaksanakan *good corporate governance* sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) sebagai tata kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak mendatangi *Letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada subjek penelitian yang terdiri dari prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Penjelasan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

Prinsip Transparency

Semua informasi dan visi misi perusahaan disampaikan keseluruhan staff melalui rapat maupun meeting kecil yang dilakukan setiap hari senin, adanya grup Whatsapp (WA) sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi. Menurut Wibisono (2006) visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Sedangkan misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.

Perusahaan menyelenggarakan RUPS setiap sekali setahun, setelah pengauditan dan buku tahunan pada bulan mei atau juni, perusahaan menerapkan prinsip *transparency* dengan sangat baik dalam hal ini yaitu mengadakan RUPS. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan (KNKG, 2006). Laporan yang dibuat perusahaan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti kepada pemegang saham, perusahaan membuat laporan untuk pemegang saham yang diberikan saat RUPS.

Pada pemerintah, perusahaan memberikan laporan kepada DISNAKER berupa laporan bulanan yang berisi kegiatan usaha yang dilakukan oleh subjek penelitian, laporan pajak yang dibutuhkan pihak fiskal untuk keperluan pajak, serta laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal seperti direksi, jajaran direksi dan komisaris. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya (KNKG, 2006). memiliki website namun, perusahaan menilai website yang ada tersebut tidak terlalu efektif dan jarang diakses. Perusahaan ketika mengumumkan lelang, langsung memberitahu kepada rekanan dengan membuat suatu *company profile*. SOP perusahaan harus sesuai Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh DISNAKER, sehingga sesuai dengan peraturan pemerintah. Terdapat sanksi ketika SOP tersebut dilanggar, sanksi tersebut berdasarkan seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut.

Prinsip Accountability

Perusahaan memastikan fungsi tersebut dijalankan dengan baik, yaitu dengan melakukan penilaian, apabila pekerjaannya lancar dan tidak ada komplain maka, perusahaan menilai fungsinya sudah dimengerti,

dan apabila ada kesalahan yang terjadi, perusahaan akan menghubungi pihak tersebut dan meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai kendala apa yang terjadi. Perusahaan juga melakukan evaluasi kinerja dari karyawan berdasarkan target yang dicapai, apakah target tersebut tercapai atau tidak.

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan (KNKG, 2006). Penentuan kebijakan dan peraturan baru di subjek penelitian berdasarkan perubahan bisnis yang sedang berlangsung dan yang terlibat di dalamnya adalah Direksi dan Komisaris. Jadi kebijakan dan peraturan tersebut bersifat dinamis berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis pada waktu tersebut. Jadi penerapan prinsip *accountability* dalam hal ini mengenai penentuan kebijakan dan peraturan baru, menurut peneliti sangat baik. Dengan seperti itu perusahaan dapat mengikuti perubahan alur bisnis yang sedang terjadi, dan dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Perusahaan dapat menyesuaikan apa yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan jalannya bisnis tersebut. Perubahan organisasi juga merupakan upaya masyarakat dalam organisasi tersebut, bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama, dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai aspek, atau melakukan berbagai penyesuaian dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, agar tujuannya dapat tercapai dan dapat bertahan dalam perubahan besar dunia (Winardi, 2006).

Pengukuran kinerja dengan memperhatikan adanya *komplain* atau tidak terhadap karyawan tersebut namun juga dilihat dari keadaan karyawan tersebut, terdapat pertimbangan juga apakah karyawan tersebut memang memiliki ketidakcakapan di suatu bidang sehingga kinerjanya menurun, ada evaluasi mengenai hal tersebut dan target yang bisa dicapai oleh karyawan juga digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan terhadap karyawan.

Perusahaan memiliki sistem *reward & punishment* yang tertuang di dalam Peraturan Perusahaan yang dimana peraturan tersebut sudah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. *Reward*-nya yaitu berupa kenaikan gaji berkala yang juga memperhitungkan masa kerjanya, adanya premi setiap bulan dan promosi jabatan. *Punishment*-nya adalah adanya demosi jabatan, evaluasi terhadap karyawan tersebut dan pemecatan. Penerapan prinsip *accountability* dalam hal ini pengukuran kinerja serta sistem *reward & punishment* dilakukan dengan sangat baik. Perusahaan menerapkan pengukuran kinerja terhadap setiap karyawannya dan selain itu adanya konfirmasi terhadap karyawan seperti apakah kendala yang dihadapi sehingga bisa terjadi *komplain* tersebut maupun kenapa target tidak bisa tercapai. Dari sistem *reward & punishment*, subjek penelitian juga menerapkan sistem tersebut yang sudah tertuang di dalam Peraturan Perusahaan dan setiap karyawan akan mendapatkan *reward & punishment* sesuai dengan kinerja yang diberikan.

Kode etik yang dijadikan pegangan oleh subjek penelitian adalah melaksanakan Peraturan Perusahaan, mengikuti aturanaturan dari pemerintah yang berlaku. Diterapkannya Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu subjek penelitian menerapkan prinsip *accountability* dalam hal ini kode etik, sangat baik dan perusahaan juga secara tidak langsung ikut melaksanakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati (KNKG, 2006).

Prinsip Responsibility

Tanggungjawab terhadap karyawan yang dilakukan seperti mengikutsertakan karyawan pada program BPJS yang diselenggarakan oleh pemerintah, tunjangan pendidikan yang disediakan untuk anak-anak dari karyawan, program pensiun dari perusahaan, uang transport dan kegiatan rekreasi bersama berupa *family gathering* bersama para karyawan. Kebijakan UMK harus sesuai kontrak dan uang makan.

Penerapan prinsip responsibility dalam hal ini perusahaan menyediakan jaminan kesejahteraan untuk karyawannya, tidak hanya kebutuhan jasmani melainkan juga menjaga hubungan antar karyawan. Tanggungjawab terhadap masyarakat yang dilakukan seperti mengadakan kegiatan buka bersama dan menyumbangkan sejumlah uang saat Idul Adha untuk daging kurban, meski kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan tidak mengganggu lingkungan disekitar perusahaan dan masyarakat. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (KNKG, 2006).

Tanggungjawab terhadap mitra bisnis yang dilakukan seperti on time delivery, melaksanakan kontrak yang sudah disetujui dengan mitra bisnis, dimana kontrak tersebut terdapat sanksi dan kewajiban serta jaminan keselamatan barang. Penerapan prinsip responsibility dalam hal ini tanggungjawab terhadap mitra bisnis menurut peneliti sudah sangat baik, dengan adanya kontrak tersebut yang sudah saling disetujui dan itikat dari perusahaan untuk memberikan yang terbaik, menunjukkan perusahaan memberikan jaminan terhadap mitra bisnis.

Tanggungjawab terhadap pemerintah melaksanakan kewajiban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan dan membuat laporan kegiatan bisnis yang dilakukan dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Tanggungjawab terhadap pemegang saham seperti mengadakan RUPS yang diadakan setiap tahun pada bulan Mei atau Juni dan terdapat laporan yang dibutuhkan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan. Penerapan prinsip responsibility dalam hal ini tanggungjawab terhadap pemegang saham karena perusahaan melaksanakan RUPS tiap tahun dan menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh para pemegang saham. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat (KNKG, 2006).

Prinsip *Independency*

Perusahaan seharusnya tidak pernah diintervensi oleh pihak-pihak di luar direksi perusahaan maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik sehingga pelaksanaan prinsip independency yang dilakukan perusahaan sangat baik. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif (KNKG, 2006).

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (KNKG, 2006). Pemerintah tidak pernah ikut campur dalam jalannya perusahaan karena, perusahaan tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku terhadap perusahaan. Penerapan prinsip independency sangat baik, karena pemerintah tidak pernah ikut dalam mengatur jalannya perusahaan.

Prinsip *Fairness*

Perusahaan memberi kesempatan bekerja yang sama bagi setiap karyawan yang memiliki kompetensi untuk bekerja di perusahaan tanpa ada perbedaan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik. Pelaksanaan prinsip fairness perlu dilakukan perusahaan dalam memberi kesempatan bekerja yang sama. Perusahaan memiliki jenjang karir, namun jenjang karir tersebut bukan berkala melainkan ketika karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik maka akan dijadikan koordinator atau kepala bagian. Pelaksanaan prinsip fairness yang dilakukan oleh perusahaan menurut peneliti sangat baik dilihat dari perusahaan memiliki jenjang karir. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,

berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik (KNKG, 2006).

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap pemegang saham, mayoritas maupun minoritas. Setiap pemegang saham memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya masing-masing saat diselenggarakannya RUPS tahunan. Namun pemegang saham mayoritas sudah pasti memiliki hak suara lebih, namun tetap menerima suara dari minoritas. Menurut peneliti pelaksanaan prinsip fairness yang dilakukan oleh subjek penelitian yaitu dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap pemegang saham sudah sangat baik. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan (KNKG, 2006).

Pemegang saham tidak memiliki hak secara individu untuk mengarahkan perusahaan, melainkan berdasarkan hasil dari RUPS, persetujuan yang tercapai dan hasil rapat digunakan untuk melanjutkan program kerja tahun berikutnya. Rapat tersebut dipaparkan laporan-laporan yang diperlukan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan. Menurut peneliti pelaksanaan prinsip fairness yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam hal hak pemegang saham mengarahkan perusahaan adalah sangat baik. Hasil RUPS menjadi penentu perusahaan untuk melanjutkan program kerja tahun berikutnya, bukan berdasarkan individu dari masing-masing pemegang saham. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing (KNKG, 2006).

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *good corporate governance* sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam kompetisi pasar global yang sudah ketat sekali. Penerapan *good corporate governance* yang berintikan pada budaya korporasi adalah merupakan sikap profesionalisme yang beretika dan bermoral tinggi, sehingga semua kekuatan manusia korporasi tidak lagi melakukan politik praktis di dalam perusahaan, melainkan bersatu padu untuk meningkatkan kualitas perusahaan menjadi kuat, kokoh, dan lebih sehat serta dapat mengembangkan perusahaan.
2. Prinsip *Transparency*, Perusahaan terbuka dalam pengambilan keputusan serta menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Tranparansi dilihat dari pengkomunikasian visi dan misi perusahaan, kebijakan perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders, tersedianya website perusahaan, adanya penerapan RUPS perusahaan.
3. Prinsip *Accountability*, Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, akuntabilitas dilihat dari adanya rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ, keselarasan dengan visi dan misi perusahaan, memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan serta sistem reward and punishment.
4. Prinsip *Responsibility*, Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Hal tersebut dilihat dari melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan, serta melaksanakan kewajiban pajak dan memberikan hak karyawan.

5. Prinsip *Independency*, Perusahaan dikelola secara independen tanpa adanya dominasi dari masing-masing organ perusahaan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Prinsip *Fairness*, Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi kepada perusahaan. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Ucapan Terima Kasih (opsional)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Referensi

- Abdifatah Ahmed Haji Sanni Mubaraq. (2015). The Implications of the Revised Code of Corporate
- Cheung, Y., Connelly, J.T., Jiang, P., and Limpaphayom, P. (2011). Does Corporate Governance Predict Future Performance: Evidence from Hong Kong. *Financial Management*, 40(1), 159-197.
- Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada,.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2012. *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan di Indonesia* (draf perbaikan 19 Juli 2013)
- Kumar, N., and Singh, J.P. (2013). Effect of Board Size and Promoter Ownership on Firm Value: Some Empirical Findings from India. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 13(1). 88-98.
- Nurjamilah, Muhamad Rizal, Ria Arifianti (2018). Studi Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui Kinerja Perusahaan: Studi Pemetaan Sistematis.
- Mak, Y.T., and Kusnadi, Y. (2005). Size Really Matters: Further Evidence on The Negative Relationship Between Board Size and Firm Value. *PacificBasin Finance Journal*, 13(3), 301- 318.
- Mardjono, M. (2006). A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail. *Managerial Auditing Journal*, 20(3), 272-283. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi* Page 75 of 81 Vol. 01 No. 02, 2018
- Mohd Ghazali, N.A. (2010). Ownership Structure, Corporate Governance, and Corporate Performance in Malaysia. *International Journal of Commerce and Management*, Vol. 20(2), 109
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU.2011, Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Prasetyo Widyo Iswara (2014). Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan
- Thodo Dixon Karel Manurung (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Kargo Di Surabaya
- Ujunwa, A. (2012). Board Characteristics and the Financial Performance of Nigerian Quoted Firms. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 12(5), 656-674.